



## INTISARI

Thesis yang berjudul “Kegagalan Proyek Perumahan Rakyat di Kota Surakarta Tahun 1976-1998” ini dibangun di atas sebuah premis yang menyatakan bahwa perumahan rakyat bukan sekedar hanya dipahami sebagai upaya mendirikan bangunan rumah tetapi juga terkait bagaimana perumahan rakyat memiliki pengaruh yang lebih luas. Studi ini diarahkan untuk mengungkap sejauh mana kebijakan perumahan rakyat mampu mengatasi persoalan kebutuhan rumah di Kota Surakarta tahun 1976-1998. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan beberapa sumber primer seperti arsip laporan pemerintah, surat kabar, foto, peta, dan wawancara. Permasalahan penelitian yang dibahas adalah bagaimana implementasi politik perumahan rakyat di Surakarta tahun 1976-1998, apa saja masalah yang muncul dalam pembangunan perumahan rakyat di Surakarta, dan bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat kebijakan perumahan rakyat terhadap Kota Surakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Orde Baru melalui pembangunan perumahan rakyat di Kota Surakarta tahun 1976-1998 tidak mampu menyelesaikan persoalan kekurangan rumah. Keterbatasan finansial menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan pemerintah Orde Baru dalam memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Berbagai masalah yang muncul meliputi persoalan pembiayaan, penyediaan air bersih, pengelolaan kapling tanah dan penghunian rumah Perumnas, keluhan penghuni rumah Sub Inti, serta polemik pembangunan Perumahan Buruh di Pucangsawit. Kebijakan pembangunan perumahan rakyat di Kota Surakarta telah menimbulkan berbagai dampak, antara lain berkembangnya wilayah Mojosongo, permukiman penduduk yang semakin padat akibat populasi yang berlebih, masifnya alih fungsi lahan khususnya terhadap lahan-lahan pertanian dan masalah lingkungan, serta ketersediaan tanah yang menjadi semakin terbatas.

Kata kunci: Kegagalan Proyek, Perumahan Rakyat, Surakarta



## ABSTRACT

This thesis, entitled “The Failure of Public Housing Projects in Surakarta City from 1976 to 1998” is based on the premise that public housing should not be understood merely as an effort to construct houses, but also in terms of how public housing has a broader impact. This study aims to reveal the extent to which public housing policies were able to address the issue of housing needs in Surakarta City from 1976 to 1998. This research uses historical methods by utilizing several primary sources such as government archives, newspapers, photographs, maps, and interviews. The research questions discussed are how public housing policy was implemented in Surakarta from 1976 to 1998, what problems arose in the construction of public housing in Surakarta, and what impact public housing policy had on the city of Surakarta.

The results of the study show that the New Order government’s policy of building public housing in Surakarta City from 1976 to 1998 was unable to solve the problem of housing shortages. Financial constraints were one of the main factors that led to the New Order government’s failure to meet the people’s housing needs. Various problems arose, including financing issues, clean water supply, land plot management and occupancy of Perumnas houses, complaints from Sub Inti house residents, and controversy over the construction of Workers’ Housing in Pucangsawit. The public housing development policy in Surakarta City has had various impacts, including the development of the Mojosongo area, increasingly dense settlements due to overpopulation, massive land conversion, especially of agricultural land, environmental problems, and increasingly limited land availability.

Keywords: Project Failure, Public Housing, Surakarta